

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dilihat dari konteks namanya, tinjauan pustaka ialah berarti meninjau kembali pustaka, literatur atau bahan bacaannya lainnya. Tinjauan pustaka diartikan sebagai studi penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai topik permasalahan tertentu. Dalam tinjauan pustaka ini akan memuat sejumlah teori, pendapat serta pemikiran ahli terhadap locus penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka pula bisa berupa ringkasan sederhana yang berasal dari sumber, tetapi biasanya memiliki pola organisasi dengan menggabungkan ringkasan dengan sintesis. Urgensi dari poin ini ialah melakukan survei literatur mengenai suatu topik. Perlunya menggunakan studi literatur seperti ini bahwa akan memperkaya pemahaman mendalam mengenai subjek yang dibahas.

Pada dasarnya tinjauan pustaka merupakan suatu kegiatan yang sangat perlu dilakukan di tahap awal untuk memulai penelitian, bahkan sangat penting sebelum merancang proposal untuk melakukan kegiatan studi pustaka. Dalam melakukan tinjauan pustaka ini memiliki segudang manfaat, mengurangi serta mempertimbangkan variable penelitian agar tujuan dari penelitian bisa terlaksana serta selesai dengan baik dan jelas, dengan ini berfungsi juga dalam memberi batasan penelitian dengan menunjukkan variable bebas atau variable terkait yang relevan dan tidak relevan. Kemudian memberi acuan dalam penelitian saat memberi artikan teknik analisa data yang sudah tersusun dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Begitupula bermanfaat untuk memberikan dasar pemikiran pada peneliti

agar dapat menyimpulkan hasil analisa sesuai dengan tujuan objektif dari penelitian.

Dalam hal ini tinjauan teori yang menjelaskan dan menjabarkan terkait teori yang dipakai dalam penulisan penelitian ini, penulis dengan penggunaan dua teori, yakni teori partal politik, dan teori kekuasaan yang kemudian dipaparkan dalam sub bab berikut.

2.1 Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam mencari beberapa perbandingan dan kemudian untuk menemukan inspirasi baru dalam penelitian setelahnya, lalu kajian terdahulu dapat memudahkan penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini penulis memaparkan berbagai hasil kajian terdahulu terkait dengan pembahasan yang ingin diteliti, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi maupun yang belum terpublikasi. Dalam penelusuran penulis terkait judul ini, penulis menyadari telah banyak penelitian yang melakukan pembahasan mengenai peran elite politik local dalam Pilkada, namun yang membedakan dari kajian terdahulu yang pernah diteliti sebelumnya adalah pada konsep, waktu dan tempat terselenggaranya penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan sumber pustaka (library research), maupaun penelitian lapangan (field research). Diantaranya :

Kajian Terdahulu I	
Judul dan Penulis Penelitian	<i>“Fenomena pasangan tunggal dan “Kotak/Kolom Kosong” Pada Pilkada Kota Tangerang”</i> Ditulis Oleh: Bambang Kurniawan dan Wawanudin pada tahun 2019.
Metode Penelitian	Pada penelitian tersebut penulis menggunakan metode analisis deskriptif dimana menggunakan penelitian survey dengan teknik pengumpulan data melalui model kuisisioner.
Fokus Penelitian	Didalam pembahasan ini, penulis memfokuskan penelitiannya pada fenomena kemunculan calon tunggal dalam pilkada yang mana penelitian ini untuk mengetahui opini publik tentang Pilkada pasangan tunggal di Kota Tangerang tahun 2018, kemudian mengetahui opini publik tentang popularitas, kinerja dalam menjalankan pemerintahan paslon petahan tersebut, selanjutnya berfokus dengan seberapa besar masyarakat Kota Tangerang mengetahui tentang kotak/kolom kosong dalam terselenggaranya Pilkada, seberapa besar partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS pada pemilihan langsung. Serta bagaimana opini masyarakat tentang implikasi jika kotak/kolom kosong yang lebih banyak memiliki suara pemilih.
Kajian Terdahulu II	
Judul dan Penulis Penelitian	Sebuah buku berjudul <i>“Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto”</i> yang didalamnya tersedia penelitian yang bertemakan <i>“Kekuasaan dan Politik di Sumatera Utara: Reformasi Yang Tidak Tuntas”</i> yang Ditulis pada tahun 2012 Oleh : Vendi R Hadiz
Metode Penelitian	Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode kualitatif, yang kemudian disertakan konsep dan teori, diantaranya yang disebut klien patron ,demokrasi transisi serta good governance.
Fokus Penelitian	Fokus penelitiannya yakni mengetahui apakah kekuasaan di daerah tersebut masih didominasi oleh aktor politik yang lama, seberapa besar pengaruh sumber daya kekuasaan seperti finansial. Bagaiman cara aktor tersebut dalam merebut kendali yang dipegang oleh pemerintah dalam membangun tiang yang lebih kokoh untuk kekuasaannya dimana proses tersebut melalui pemilihan kepala daerah di parlemen dalam tujuan menguasai.
Kajian Terdahulu III	
Judul dan Penulis Penelitian	<i>“Fenomena Calon Tunggal: Studi kasus pada pilkada 2016 di 16 Kabupaten/Kota”</i> Ditulis Oleh Lembaga: Badan Pengawas Pemilihan Umum
Metode Penelitian	Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif

Fokus Penelitian	Fokus pada penelitian ini, ialah meneliti apakah tindakan seperti memborong partai menjadi sebab akurat dalam kemunculan calon tunggal, kemudian bagaimana syarat menjadi calon kepala daerah sehingga kandidat memilih mundur dalam kontestasi pilkada tersebut. Serta pelanggaran - pelanggaran dalam pilkada masuk pada pembahasan dalam penelitian ini.
Kajian Terdahulu IV	
Judul dan Penulis Penelitian	<i>“Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”</i> Ditulis Oleh: Lili Romli yang diterbitkan dalam <i>Jurnal Penelitian Politik</i> .
Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif
Fokus Penelitian	Penelitian ini lebih berfokus untuk melihat apa yang menjadi faktor pendukung munculnya calon tunggal di beberapa daerah yang mengalami calon tunggal, kemudian penelitiannya ini tidak fokus mengkaji untuk satu wilayah melainkan semua daerah yang mengalami pilkada dengan calon tunggal. Dimana pada penelitian ini ditujukan untuk mengetahui fenomena calon tunggal ini disebabkan oleh faktor pragmatisme partai politik, kegagalan kaderisasi, serta mahar politik yang semakin mahal.
Kajian Terdahulu V	
Judul dan Penulis Penelitian	<i>“Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan Di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016”</i> Ditulis Oleh: Endik Hidayat, Budi Prasetyo dan Setya Yuwana.
Metode Penelitian	Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik data deskriptif yakni dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
Fokus Penelitian	Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya tentang penggunaan dan mobilisasi sumber daya kekuasaan oligarki di pedesaan Jawa. Apakah masih bertumpu kepada sumber daya kekuasaan material, atau telah berkolaborasi dengan sumber daya kekuasaan lainnya. Karena diketahui penguasa oligarki di desa Sitimerto telah membangun rumpun kekuasaan politik atau yang sering disebut dinasti politik keluarga sejak tahun 1998 yang lalu. Sebagai dampak liberalisasi politik ditingkat nasional berimbas kepada politik pedesaan.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.

(Sumber: Diolah oleh Penulis)

Dalam kajian terdahulu yang pertama terdapat karya yang tulis oleh Bambang Kurniawan dan Wawanudin. Dengan judul “*Fenomena pasangan tunggal dan Kotak/Kolom Kosong*” Pada Pilkada Kota Tangerang” penelitian ini ditulis bertujuan untuk mengetahui opini publik tentang pilkada pasangan tunggal di Kota Tangerang tahun 2018, pendapat masyarakat terhadap popularitas pasangan calon petahan yakni Arif R. Wismansyah – Sachrudin, opini publik mengenai bagaimana kinerja psangan calon petahana ini, tingkat pengetahuan masyarakat Kota Tangerang mengenai kotak kosong pada pilkada Kota Tangerang, kemudian opini masyarakat tentang implikasi jika kotak kosong yang memiliki lebih banyak suara dan mngetahui tingkat partisipasi masyarakat wilayah yang datang ke TPS dalam pilkda ini. Pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian survey dengan teknik pengumpulan data melalui model kuisisioner. Kemudian hasil dari penelitian ini, menjelaskan bahwa pasangan calon petahan cukup populer di kalangan masyarakat, sebagian responden yang puas dengan kinerja pasangan calon petahana, mayoritas masyarakat tidak terlalu tahu bahwa pasangan calon ini melawan kotak kosong dan tidak mengetahui implikasi jika kotak kosong yang banyak suara atau menang. Tentunya dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang ingin dilakukan mempunyai sisi perbedaan serta keunikan sendiri, yang menjadi pembeda adalah konsep dan waktu pelaksanaan penelitian. Penelitian proposal ini akan meneliti kekuasaan Arief Wismansyah di Kota Tangerang sebagai aktor yang mendominasi pilkada Kota Tangerang, kemudian berfokus pada penyebab munculnya calon tunggal yang melawat kota/kolom kosong, serta dengan penyelenggaraan tersebut menimbulkan dampak apa terhadap konstelasi

politik pada pilkada Kota Tangerang Tahun 2018. Terdapat beberapa fokus persamaan dalam kedua penelitian tersebut seperti membahas aktor yang sama di wilayah yang sama, kemudian kemunculan calon tunggal, adanya kotak kosong serta menggunakan metode yang sama. Yang menjadi pembeda dari penelitian terdahulu dengan yang ingin penulis teliti ialah penelitian terdahulu menggunakan model popularitas aktor yang maju dalam pilkada Kota Tangerang Tahun 2018. sedangkan dalam penelitian penulis dalam proposal ini menggunakan model kekuasaan yang akan diteliti adalah dampak dari calon tunggal dalam terselenggaranya pilkada .¹

Dalam kajian terdahulu kedua bersumber dari sebuah buku karya Vendi R Hadiz yang di terbitkan pada 2005 lalu. Didalam buku ini terdapat penelitian yang berjudul “*Kekuasaan dan Politik di Sumatera Utara: Reformasi Yang Tidak Tuntas*”. Dalam penelitian ini berfokus pada peran aktor yang masih mendominasi karena pengaruh sumber daya finansialnya di wilayah tersebut. Kemudian hasil temuan dari apa yang sudah dianalisa bahwa kekuasaan didaerah Sumatera Utara ini masih dikendalikan oleh aktor lama yang memiliki latar belakang sumber daya finansial yang cukup tinggi. Mesin birokrasi serta adanya kekerasan oknum preman yang memang sudah tidak asing sejak masa Soeharto. Tujuan yang ingin diperoleh oleh aktor - aktor tersebut dimana mereka dapat mengambil kendali kekuasaan daerah melalui Pilkada di parlemen yang bertujuan mereka dapat bebas mengelola keuangan daerah. Jika kita lihat yang menjadi pembeda dari penelitian tersebut

¹ Bambang Kurniawan and Wawanudin, ‘Fenomena Pasangan Tunggal dan "Kotak/Kolom Kosong Pada Pilkada Kota Tangerang’, *Jurnal Moziak*, XI.2 2019, 15–27.

dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yakni konsep, tempat, aktor, dan waktu pelaksanaannya. Penelitian proposal ini akan meneliti kekuasaan Arief Wismansyah di Kota Tangerang sebagai aktor yang mendominasi pilkada Kota Tangerang, kemudian berfokus pada penyebab munculnya calon tunggal yang melawan kota/kolom kosong, serta dengan penyelenggaraan tersebut menimbulkan dampak apa terhadap konstelasi politik pada pilkada Kota Tangerang Tahun 2018. Peneliti terdahulu menggunakan model kekuasaan yang menjadi penelitian adalah elit, sedangkan dalam penelitian penulis dalam proposal ini menggunakan model kekuasaan yang akan diteliti adalah dampak dari calon tunggal dalam terselenggaranya pilkada.²

Dalam kajian terdahulu ketiga ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan tema bahasan "*Fenomena Calon Tunggal: Studi kasus pada pilkada 2016 di 16 Kabupaten/Kota*" Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang menjadi sebab terbentuknya calon tunggal dalam Pilkada, yang paling tersorot ialah karena syarat untuk menjadi calon kepala daerah membutuhkan beberapa persiapan yang matang dari popularitas serta elektabilitas sehingga persyaratan tersebut dianggap berat dimana menjadikan kandidat yang ingin mencalonkan memilih mundur sebagai calon dalam pilkada. Lalu praktik borong partai pula menjadi penyebab yang tidak kalah tersorot, praktik borong partai ini bertolak belakang dengan sistem demokrasi jika didalamnya mempunyai kepentingan

² Vedi R. Hadiz, *Dinamika Kekuasaan : Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto* (Jakarta: LP3ES, 2005).

tertentu dan terdapatnya pelanggran yang dilakukan dalam pilkada tersebut. Yang menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah riset jangkauan yang lebih luas yaitu 16 kabupaten sementara dalam kasus penelitian yang penulis teliti hanya satu kota saja. Kemudian dalam penelitain penulis cenderung membahas bagaimana dampak konstelasi politik pada pilkada Kota Tangerang Tahun 2018 menggunakan model kekuasaan yang akan diteliti adalah dampak dari calon tunggal dalam terselenggaranya pilkada.³

Dalam kajian terdahulu keempat, dengan judul "*Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal*" yang dikemukakan oleh Lili Romli dalam penerbitan jurnal penelitian politik terdapat hasil yang memaparkan beberapa temuan. Pertama terdapatnya calon tunggal sebagai akibat dari dua pihak yang masing - masing mempunyai kepentingan. Kemudian gagalnya partai politik dalam melakukan kaderisasi dan telah terjadinya krisis sosok kepemimpinan di daerah. Selanjutnya keberadaan calon tunggal pasti tidak terpungkiri bahwa mahar politik yang mahal baik dilihat calon kandidat tersebut maju melalui jalur perseorangan atau independent maupun dari jalur partai politik. Kedua terjadinya paragtisme partai politik, dimana partai politik menggunakan mementingkan kepentingannya dan mencari jalan pintas untuk tidak mengusung calon lainnya dikhawatirkan takut kalah. Terakhir, pada beberapa daerah calon tunggal mengindikasikan desentralisasi dan otonomi daerah mengalami stagnasi, kondisi tersebut yang pada akhirnya menjadi sebab kemunculan raja-raja kecil untuk berkuasa dalam wilayah

³ Penelitian Fenomena Calon Tunggal: Studi Kasus Pada Pilkada 2018 Di 16 Kabupaten/Kota - Puslitbangdiklat Bawaslu.

mereka masing - masing baik dalam hal penguasaan politik, eksekutif dan yudikatif tingkat lokal. Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian penulis pertama jika kita lihat dalam penelitian karya Lili Romli membahas mengenai lingkup semua daerah sedangkan penelitian penulis mengacu pada satu daerah saja, kemudian tempat dan waktu pelaksanaannya yang berbeda, memang dalam penelitian ini sama - sama mempunyai tema untuk membahas penyebab munculnya calon tunggal, tetapi lokus fokus pada penelitian penulis lebih cenderung dalam pembahasan dampak terhadap konstelasi dalam pilkada Kota Tangerang tahun 2018.⁴

Dalam kajian terdahulu kelima. Penelitian ini berjudul "*Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan Di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016*" Yang ditulis Oleh: Endik Hidayat, Budi Prasetyo dan setya Yuwana. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya tentang penggunaan dan mobilisasi sumber daya kekuasaan oligarki di pedesaan jawa. Apakah masih bertumpu kepada sumber daya kekuasaan material, atau telah berkolaborasi dengan sumber daya kekuasaan lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik data deskriptif yakni dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Keterlibatan praktik oligarki dalam penelitian kelima ini bersifat dinasti, dijelaskan dalam analisis penelitiannya bahwa di Desa Sitimerto keluarga H. Mul melakukan kegiatan money politik dalam

⁴ Lili Romli, 'Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi Lokal', *Jurnal Penelitian Politik*, 15.2 (2018).

mempertahankan kekuasaannya dengan menyarankan putranya untuk meneruskan kepemimpinan ibunya yang sudah menjabat dari 1998 - 2015. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti penulis cenderung membahas dominasi aktor politik dalam pilkada Kota Tangerang Tahun 2018 sehingga artinya tidak ada keterkaitan adanya ikatan kekeluargaan seperti halnya politik oligarki yang terdapat di Desa Sitimetro.⁵

2.2 Kerangka Teori

Landasan teori dan kerangka teori yaitu pemahaman mendasar serta mendalam berkaitan dengan teori dan konsep yang nantinya akan digunakan untuk memperkuat analisa dalam melakukan penelitian. Didalam sub bab berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan pada bab pendahuluan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang aktor mendominasi pilkada di Kota Tangerang Tahun 2018, apa penyebab dari kemunculan calon tunggal dan bagaimana dampak yang muncul terhadap konstelasi dalam pilkada tersebut. Maka untuk itu, Pertama penulis akan memaparkan teori yang bersifat umum guna mempermudah pembaca dalam memaknai permasalahan penelitian dan selanjutnya diikuti dengan teori teori yang lebih spesifik untuk menunjang penulisan ini. Oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran, terdapat teori Carl J. Friedrich tentang partai politik sebagai salah satu teori yang akan menjadi landasan analisa penelitian dengan didukung oleh teori kekuasaannya Miriam Budiarjo, konsep ini akan dipaparkan secara jelas dan rinci sebagai bahan yang mendasar

⁵ Setya Hidayat, budi, 'Praktik Politik Oligarki Dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan Di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016', *Jurnal Sosial Politik*, 4.2 (2018), 124.

dalam menganalisis lebih jauh serta memperkuat argumentasi sebagai pijakan kerangka konseptual.

2.2.1 Konsep Pemilihan Kepala Daerah

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pemilihan Kepala Daerah, terdapat beberapa pengertian tentang ketua wilayah yaitu diantaranya, berdasarkan pedoman Hukum, Kepala Daerah merupakan orang yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk memimpin atau mengepalai suatu wilayah, contohnya Gubernur untuk provinsi (wilayah taraf I) atau Bupati untuk Kabupaten dan Kota (wilayah taraf II).⁶ Istilah Kepala Daerah sejak awal kemerdekaan, khususnya pada peraturan Undang – Undang mengenai pemerintahan daerah selalu mengandung arti menjadi kepala daerah otonom, yakni klasifikasi atas desentralisasi, yang berlaku dalam taraf Kabupaten dan Kota yang dalam masa Undang – Undang pemerintah daerah sebelum undang – undang. No 22 Tahun 1999, lebih diketahui sebagai Daerah tingkat II. Pengaturan Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 telah berubah pengaturan Daerah Kabupaten/Kota hanya menjadi daerah otonom belaka, sedangkan Provinsi berkedudukan sebagai wilayah daerah otonom terbatas dan daerah administrasi.⁷ Maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya Kepala Daerah adalah seorang yang terpilih melalui pemilihan dan memiliki tugas serta kewenangan untuk memimpin, mengatur serta mengurus

⁶ Telly Sumbu, *Kamus Umum Hukum Dan Politik*, ed. by Robert J.P. (JAKARTA: Permata Aksara, 2010) h.383.

⁷ J Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola Kegiatan Kekuasaan Dan Perilaku Kepada Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, ed. by Tarmizi (JAKARTA: Sinar Grafika, 2009),h.2.

daerah otonomnya masing – masing sesuai atas desentralisasi yaitu Gubernur untuk Provinsi dan Bupati untuk Kabupaten serta Walikota untuk Kota.

Pemahaman Pemilihan Umum Kepala Daerah dapat diartikan bahwa pemilihan umum yang kedaulatan rakyatnya diciptakan oleh pemilih dan atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan dipilih secara politik menurut kehendak rakyat melaksanakan keputusan, pemilujuga menyiratkan mekanisme perubahan politik yang dilaksanakan secara periodik dan teratur, dalam hal pola dan arah kebijakan publik atau sirkulasi elit. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah umumnya disebut dengan Pemilukada, yang dimana hal ini sebagian dari praktik demokrasi. Pemimpin daerah adalah jabatan politik yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan menggerakkan lajunya roda dalam urusan pemerintah.⁸

Istilah jabatan publik berarti bahwa pemimpin lokal menjalankan fungsi membuat keputusan langsung, memengaruhi rakyat dan diperhatikan untuk kepentingan rakyat atau massa. Oleh sebab itu pemimpin daerah terus dipilih dan dimintai pertanggung jawaban oleh rakyat. Penting jabatan politik ialah mekanisme rekrutmen pemimpin daerah bersifat politis, yakni melalui pemilihan umum yang memiliki komponen politik yaitu melalui seleksi individu terhadap orang – orang yang dicalonkan sebagai pemimpin daerah. Dalam kehidupan politik daerah. Pilkada merupakan kegiatan yang layak disandingkan dengan

⁸ Maulana Hasanudin Ida Farida, Nanang Permana, Sopwan Ismail, 'Analisis Dmpak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: Reformulasi Sitem Pemilihan Kepala Case Law,(2020), 55.

pemilihan anggota parlemen yang membuktikan bahwa kepala daerah dan DPRD adalah mitra.⁹

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan bahwa pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut pemilihan, ialah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten dan kota untuk memilih Kepala Daerah secara langsung dan demokratis.

UUD 1945 adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan kekuasaan dan tanggung jawab sebagai organ negara, UUD 1945 juga mendefinisikan batas – batas berbagai pusat kekuasaan dan menggambarkan hubungan diantara mereka.¹⁰ Materi yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berada di bawah UUD 1945 tidak boleh bertolak belakang dengan materi UUD 1945 yang diterjemahkan kedalam undang – undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan pemerintah pengganti undang – undang (Perpu) dan sebagainya. Pasal – pasal yang terkandung dalam UUD 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam penyusunan undang – undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan pemerintah pengganti undang – undang (Perpu) dan sebagainya dan kemudian yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah yakni :

⁹ Agus Hadiawan, 'Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Propinsi Lampung (Studi Di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro Dan Kota Bandarlampung)', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3.7 (2009)

¹⁰ Miriam Budiarjo, op.cit.h.169

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- c. Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang
- d. Peraturan KPU Republik Indonesia No.4 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan KPU No.3 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
- e. Peraturan KPU Republik Indonesia No.5 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU No.9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

System Pemilu ialah seperangkat metode dimana warga negara mengatur pemilihan perwakilan untuk duduk dibadan legislatif dan eksekutif. Sistem pemungutan suara ini sangat penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan,¹¹ sebab :

1. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan.
2. Sistem pemilihan memengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk

¹¹ Asfar M, 'Pemilu Dan Perilaku Memilih 1955-2004', in *Surabaya: Pustaka Utama*, (Universitas Michigan: Eureka, 2004), p. 137

3. Sistem pemilihan membentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian tersebut
4. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya
5. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik
6. Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga
7. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilunya.
8. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.

Di sebagian besar negara demokrasi, pemilu sebagai simbol dan ukuran demokrasi mereka. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dengan suasana terbuka dengan kebebasan berekspresi dan berserikat merupakan cerminan partisipasi dan aspirasi rakyat yang cukup akurat. Namun, jelas bahwa pemilihan parlemen bukan satu – satunya tolak ukur dan harus dilengkapi pengukuran beberapa kegiatan lain yang secara inheren lebih berkelanjutan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan lain sebagainya. Pemilihan jenis sistem pemilihan langsung selalu memperhatikan aspek “legitimasi” dan “efisiensi” yang selalu “trade-off”, dengan kata lain memilih

sistem yang sangat dibenarkan akan selalu menghasilkan hasil yang tidak efisien, disisi lain jika fokus hanya pada efisiensi menyebabkan hasil pemilu kurang legitimasi.

Sistem pemilihan kepala daerah sangat berpengaruh terhadap karakter dan daya saing calon kepala daerah. Sifat dan karakteristik persaingan berarti bahwa sistem pemilu mudah dimanipulasi sehingga karakteristik dan kecenderungan yang membedakan persaingan dalam pilkada dapat dicurangi untuk mendorong perilaku politik tertentu.¹²

Sistem pemilihan langsung juga memiliki karakteristik serta kecenderungan yang berbeda dari jenis kompetisi yang diadakan, yang kemudian pemilihan langsung memerlukan pertimbangan yang cermat dari kecenderungan ini dan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui penerapan sistem pilkada di Indonesia, perlu ditinjau berbagai jenis pilkada langsung, diantaranya yaitu :

1. First Past the Post System

Sistem pertama the post system dikenal sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Calon kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak otomatis memenangkan pemilihan kepala daerah dan menduduki jabatan kepala daerah. Oleh karna itu, sistem ini juga disebut juga sistem pemungutan suara mayoritas sederhana. Akibatnya, legitimasi calon terdepan di wilayah itu sering

¹² Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem Dan Problematika Penerapan Di Indonesia* (Semarang: Kerja sama Pustaka Pelajar dengan Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2005).

dipertanyakan karena bisa memenangkan pemilu meski memperoleh kurang dari setengah dari total suara yang diberikan.

2. Preferential Voting System atau Approval Voting System

Sistem pemungutan suara preferensial, atau sistem pemungutan suara musyawarah, bekerja agar pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga kepada calon kepala daerah yang hadir pada saat pemilihan. Kandidat secara otomatis memenangkan pemilihan langsung dan terpilih sebagai kepala daerah jika meraih suara terbanyak. Meskipun sistem ini dikenal sebagai adaptasi dari Sistem Pemungutan Suara Sederhana, namun dapat mengganggu proses penghitungan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga penghitungan suara mungkin perlu dilakukan secara terpusat.

3. Two Round System atau Run-off system

Sistem dua putaran, seperti namanya, bekerja agar pemilihan diadakan dalam dua putaran (suara putaran kedua) jika tidak ada kandidat yang memperoleh mayoritas mutlak (50% atau lebih) dari total suara yang diberikan pada pemungutan suara pertama. Dua kandidat teratas dengan suara terbanyak akan diminta untuk mengambil pemungutan kedua beberapa saat setelah pemungutan suara pertama. Umumnya jumlah suara minimum yang harus diperoleh seorang kandidat dalam pemungutan suara kedua adalah 20-30%. Dan sistem ini sangat populer di negara presidensial.

4. Sistem Electoral Collage

Cara kerja sistem Electoral Collage adalah bahwa setiap daerah pemilihan (gabungan kelurahan – kecamatan untuk bupati atau walikota dan gabungan

kabupaten atau kota dan gabungan kabupaten atau kota untuk gubernur) memiliki sebuah perguruan tinggi pemilihan (Electoral Collage) sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pemilihan, jumlah total suara yang diterima oleh masing – masing kandidat disetiap daerah pemilihan dihitung. Pemenang setiap daerah pemilihan berhak atas suara dewan pemilihan untuk daerah pemilihan tersebut. Kandidat yang menerima suara terbanyak dari electoral collage memenangkan pemilihan langsung. Secara umum, calon yang memperoleh suara terbanyak didaerah pemilihan yang padat penduduknya adalah kepala daerah yang terpilih.¹³

2.2.2 Demokrasi Lokal

Menurut Soekarno dan Hatta, demokrasi yang dicita – citakan oleh negara Indoneisayang saat itu sedang berjuang untuk merdeka, biasanya bukanlah demokrasi liberal yang berpihak pada kelompok – kelompok status sosial ekonomi tinggi.¹⁴ Lebih tepat bagi kapitalis yang berkembang biak. Indonesia didirikan untuk mendistribusikan kesejahteraan semua orang secara merata. Negara ini juga didirikan untuk menjamin hak – hak sosial warganya dan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi.¹⁵

Demokrasi Indonesia merupakan bentuk demokrasi penuh bagi Indonesia, demokrasi politik dan ekonomi yang tidak mengandung individualisme. Bung

¹³ Prihatmoko.*op.cit.*hlm,116.

¹⁴ Moh. Mahfud M. D., *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* - (Yogyakarta: Gama Media, 1999) h.135.

¹⁵ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008)

Hatta juga memaknai demokrasi penuh sebagai adaptasi dari tradisi asli Indonesia. Yaitu menjunjung tinggi nilai – nilai kebersamaan dan kekeluargaan.

Di tingkat daerah, pembangunan yang lebih maju sedang berlangsung. Salah satu dinamika kehidupan politik didaerah ditandai dengan kesetaraan kedudukan eksekutif dan legislatif dalam politik daerah. Isu yang tampaknya fluktuasi, antar eksekutif dan legislatif di tingkat lokal menjadi fenomena menarik untuk diamati.¹⁶

Dalam beberapa kasus politik lokal, konflik antara eksekutif dan legislatif tidak hanya mempengaruhi dimensi kelembagaan, tetapi juga hubungan pribadi antara individu di legislatif dan kepala pemerintah ditingkat lokal. Sejak UU otonomi daerah berlaku, banyaknya kepala daerah yang diberhentikan di beberapa daerah setidaknya menjadi salah satu indikasi kuat bahwa daerah konflik menyebar dari pusat ke daerah. Kasus pilkada dan pemberhentian kepala daerah di beberapa daerah seperti Sampan, Maluku Utara, Surabaya, Kepulauan Riau, Kota Kendari, Kalimantan Selatan adalah contoh nyata bagaimana trend konflik yang muncul di beberapa daerah.¹⁷

Demokrasi lokal adalah bagian dari subsistem politik negara dan tingkat pengaruhnya terletak dalam koridor pemerintah lokal. Di Indonesia, demokrasi lokal merupakan subsitem demokrasi yang memberi kesempatan kepada

¹⁶ Dwi Agus Susilo Hery Susanto, Kurnia Danuaji, *Otonomi Daerah Dan Kompetensi Lokal : Pikiran Serta Konsepsi Syaukoni HR*, ed. by Wahid Nur Effendi (Jakarta: Milinium, 2003),h.42.

¹⁷ Hery Susanto, *Dkk,op,cit,h.45*.

pemerintah daerah untuk mengembangkan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat di sekitarnya.¹⁸

Demokrasi di tingkat lokal dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, esensi demokrasi adalah partisipasi politik, pengangkatan pejabat merupakan bagian dari partisipasi politik, pemilihan langsung pejabat publik lebih demokratis daripada sistem perwakilan. Dalam konteks ini pemilihan kepala daerah secara langsung meningkatkan kualitasn keterwakilan karena persekutuan memilih pemimpinnya sendiri. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan pemimpin lokal meningkatkan legitimasi pemimpin lokal. Kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk menentukan calon pemimpin yang dipandang mampu memecahkan masalah daerah. Rakyat memilih gubernur, walikota, atau bupati. Seleksi ini menunjukkan apakah seorang calon kepala daerah benar – benar merakyat. Ketiga, dalam pemilihan langsung, masyarakat terlibat langsung dalam memilih pemimpin. Melalui partisipasi langsung rakyat dengan cara ini meningkatkan demokrasi tingkat lokal, dimana rakyat benar – benar memiliki kedaulatannya, yang kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh, yang berarti kesatuan bangsa. Demokrasi lokal telah menjadi ranah geopolitik bagi tokoh – tokoh lokal yang benar – benar diterima

¹⁸ Deden Faturahman, 'Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia', *Journal Legality*, 12.1 (2005)

oleh publik. Sebuah ruang nyata yang menjadi jantung para pemimpin lokal mewujudkan harapan dan aspirasi masyarakat sekitar.¹⁹

2.2.3 Teori Partai Politik

Menurut Budiardjo partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan citacita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melkaskan programnya. Sedangkan menurut Giovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok poloitik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatn-jabatan politik.²⁰

Menurut Carl J. Friedrich partai politik adalah sekelompok mmanusia yang terorganisir secara stabil, dengan tujuan membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal ataupun matril.²¹

Partai politik berperan sebagai penghubung antara penguasa dan yang diperintah, yaitu menyampaikan informasi dari masyarakat kepada penguasa dan sebaliknya dari penguasa kepada masyarakat. Informasi berupa pendapat dan

¹⁹ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007).

²⁰ Ibid, 55.

²¹ Ibid, 22.

keinginan masyarakat diatur dan diolah sedemikian rupa sehingga dapat disampaikan kepada para pengambil keputusan politik. Sebaliknya, partai politik menyebarluaskan informasi yang diterima dari pemerintah kepada masyarakat berupa rencana, program atau kebijakan pemerintah. Selain menyampaikan ideologi partai kepada anggotanya, partai juga harus menyampaikan nilai-nilai dan keyakinan politik yang berlaku. Partai politik harus mendidik masyarakatnya untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sebuah proses yang disebut sosialisasi politik. Kegiatan ini biasanya dilakukan sebagai sarana penyampaian pemahaman politik melalui sosialisasi tentang politik. Di negara-negara berkembang, tugas utama sosialisasi politik cenderung mengarah pada peningkatan integrasi nasional, yang biasanya terjadi pada negara-negara dengan heterogenitas.²²

Partai politik berupaya menarik warga negara untuk menjadi anggota partai politik, yang berarti memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Rekrutmen politik merupakan salah satu cara partai politik menyiapkan calon pemimpin. Salah satu cara yang dilakukan partai politik adalah dengan merekrut pemuda untuk dilatih sebagai kader partai dan mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan. Rekrutmen politik juga bertujuan untuk menjamin keberlangsungan eksistensi partai politik yang

²² M. Labolo. Partai Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis, Jakarta 2015, 285.

bersangkutan. Dengan demikian proses pembaharuan berjalan dengan lancar, kelangsungan hidup partai dan pembaharuan pimpinan partai terjamin.²³

Sistem persaingan politik dan kontrol media memaksa partai politik untuk berubah. Beberapa cara lama yang sering berkembang, seperti manipulasi, tekanan, eksploitasi, sudah tidak praktis lagi. Sehingga perlu dipikirkan cara-cara baru untuk memenangkan persaingan politik. Harus ditekankan bahwa persaingan politik tidak bisa dimenangkan dengan cepat dan sekejap mata. Selain itu, membangun kepercayaan publik atau dukungan publik dan komitmen publik untuk mendukung partai politik. Oleh karena itu bagaimana membuat partai politik berkelanjutan, hal ini harus dilakukan dengan menciptakan profesionalisme politik di dalam organisasi dan para politisinya.²⁴

Profesionalisme ini dilihat sebagai sikap yang berusaha mendekati standar ukuran sebagaimana mestinya. Profesionalisme organisasi dapat diwujudkan melalui penerapan seluruh peraturan dan tata tertib baik di tingkat nasional maupun dalam struktur organisasi partai politik itu sendiri. Peraturan yang mengatur tentang perekrutan, pemilihan, pembaharuan, pengangkatan kembali pimpinan partai dan pemilihan calon partai harus sesuai dengan asas dan aturan yang disepakati bersama. Pada saat yang sama, profesionalisme para politisi tercermin dari sikap dan upaya mereka dalam bersikap dan bertindak sebagaimana mestinya sebagai politisi. Tentu saja hal ini sulit dipahami jika sistem dan prosedur yang ada di dalam organisasi partai tidak tertata. Agar

²³ Ibid, 150.

²⁴ Ibid, 182.

profesionalisme partai politik dapat berjalan, struktur internal partai harus diperbaiki. Secara umum, profesionalisme partai politik terkait erat dengan insentif ekonomi. Ini karena masih sangat sulit untuk mengharapkan elit partai fokus pada peran dan tanggung jawab mereka sebagai politisi kecuali mereka mendapat imbalan finansial. Oleh karena itu, perlu dirancang sistem penghargaan bagi mereka yang menjalankan tugas struktural di infrastruktur partai, yang akan membantu mereka fokus dan berkonsentrasi pada tugas dan tanggung jawab mereka sebagai elit partai atau politisi, tentunya hal ini untuk membantu partai politik dan politisi berinteraksi dengan masyarakat.

2.2.4 Teori Kekuasaan

Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan Politik adalah “kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat - akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber - sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber - sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.

Dalam pembahasan terkait teori kekuasaan bahwa dalam bukunya yang berjudul dasar - dasar ilmu politik Miriam Budiardjo mengemukakan pendapatnya bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan - tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Kekuasaan berasal dari kata kuasa yang memiliki arti kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Dimana kekuasaan ini merupakan konsep penting khususnya ilmu politik, karena makna politik itu sendiri adalah bagaimana mempertahankan, merebut, memperjuangkan kekuasaan. Untuk mencapai proses tersebut akan melewati tahap pengaruh, mempengaruhi baik kepada relasi yang menguasai dan tunduk untuk pemberian perintah.²⁵

Kekuasaan diartikan sebagai konsep yang paling mendasar dalam ilmu-ilmu sosial, dimana ada beberapa penekanan menurut Russell, ia berpendapat bahwa ada batasan umum untuk kekuasaan, yaitu merupakan produk dari pengaruh yang diharapkan. Seseorang perlu memiliki power yang besar jika ingin mencapai suatu tujuan yang diinginkannya dan diinginkan banyak orang. Ada faktor eksplisit dan implisit berupa keinginan akan kekuasaan. Faktor implisit adalah faktor eksternal yang mempengaruhi tata kelola individu sedangkan faktor eksplisit dari dalam dirinya sendiri secara individu.²⁶

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik - Miriam Budiardjo Google Buku*, Ed. Rev. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

²⁶ Nuky Wijaya, 'Deskripsi Kebutuhan Berkuasa (Need for Power) Teori Kekuasaan Bertrand Russel', 2003.

Jenis-Jenis kekuasaan yang umum kita kenal dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis kekuasaan, seperti kekuasaan eksekutif, yang secara teknis disebut kekuasaan pemerintah, yang mengendalikan roda pemerintahan. Lalu kemudian ada legislatif, yang dimana memiliki kekuasaan untuk membuat dan mengesahkan undang -undang dan mengawasi urusan pemerintah. Dan yudikatif adalah otoritas pengatur undang-undang yang didukung oleh kekuatan polri untuk memastikan penegakan hukum serta menjamin law enforcement.

Elemen kekuasaan memiliki tiga elemen yang mempengaruhi bagaimana penguasa dan pemimpin menjalankan kekuasaannya. Komponen-komponen ini terhubung dengan lingkaran kehidupan penguasa dan harus dilacak dan dipelajari. Ketiga komponen tersebut adalah pemimpin (pemilik atau pengelola kekuasaan), pengikut dan situasi. Dari konsep ini, pemimpin sebagai pemegang kekuasaan dapat mempengaruhi pengikutnya. Bahkan menciptakan pengikut, menggiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga kepengikutan si pengikut akan membabi buta, tidak rasional lagi. Pengikut sebaliknya juga bisa mempengaruhi pemimpin, bisa memberikan bisikan kepada pemimpin, bisa menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya. Pemimin juga dapat menciptakan situasi untuk membentuk situasi. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam situasi ini, pemimpin bisa mendapatkan keberuntungan dan keuntungan, dan karena situasi ini, pemimpin akhirnya akan jatuh dan menghabiskan sejarah kekuasaannya sendiri. Dalam hal ini dibutuhkan figur pemimpin yang benar-benar cerdas untuk memperhidungkan situasi yang diciptakan.

Dari gerak ketiga unsur diatas, kekuasaan juga memiliki unsur pengaruh, yaitu penegasan persuasif agar perilaku dapat diubah. Kekuasaan juga memiliki unsur persuasi yang artinya kemampuan membujuk orang secara positif dan negatif melalui sosialisasi atau persuasi (persuasi atau rayuan) paksaan, paksaan yaitu tindakan tekanan kekuatan mungkin melibatkan kekuatan unsur kekerasan, atau kekuatan massa termasuk dengan kekuatan militer. Dengan begitu penjelasan tentang kekuasaan diatas para kandidat bisa menggunakan tiga komponen yaitu diantara influence, persuasion, dan coercion.

Max Weber mengemukakan beberapa bentuk otoritas dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan kekuasaan. Menurut Weber, wewenang ialah kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu diterima secara formal oleh anggota masyarakat. Kekuasaan sekarang dikonseptualisasikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain secara independent dari penerimaan sosial formal. Dengan kata lain, kekuasaan adalah kemampuan untuk menentukan atau mempengaruhi sikap orang lain sesuai dengan keinginan pemegang kekuasaan.²⁷

Analisis terpenting dalam studi Weber adalah bahwa Weber tidak ingin mereduksi stratifikasi dari sudut pandang ekonomi, tetapi Weber melihat stratifikasi sebagai multidimensi. Kayra Weber tidak akan mempengaruhi penelitian ekonomi, tetapi juga memberikan analisis aspek disiplin ilmu lainnya.

²⁷ Arifuddin Siraj, 'Implikasi Kekuasaan Terhadap Konstitusi Dan Pilkada Di Era Otonomi Daerah', *Al-Ulum: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar*, 18.1 (2018), 19–40.

Menurutnya, masyarakat dikelompokkan berdasarkan ekonomi, status dan kekuasaan.

Kekuasaan atas orang dapat dilakukan dengan mempengaruhi orang secara fisik melalui hukuman atau dengan mempengaruhi opini melalui propaganda. Ini adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan yang sulit dikatakan. Bowman menggambarkan kekuasaan dalam hal kekayaan, militer, pemerintah, prestasi, dan pengaruh. Kekayaan dapat menjadi hasil dari kekuasaan dengan memanfaatkan kekuatan dan pengaruh militer. Sumber daya sekarang ialah asal dari semua kekuatan lainnya.²⁸ Namun dalam hal ini Weber tidak sepemahaman dengan pandangan tersebut, yang menyatakan bahwa kekuasaan harus dilihat dari dalam keberadaan manusia. Kekuasaan ekonomi belum tentu sama dengan kekuasaan lainnya. Orang tidak mencari kekuasaan karena mereka ingin kaya. Orang-orang mencari kekuasaan untuk kehormatan, kekuasaan dan kehormatan membutuhkan jaminan yang dibenarkan secara hukum untuk keberadaan ketertiban. Undang-undang pengaturan merupakan tambahan penting dalam memperluas kekuasaan dan praktis, tetapi Mr Weber mengatakan bahwa kekuasaan selalu pada orang lain, bahkan jika orang itu menolak. Tidak ada batasan untuk apa yang dapat anda lakukan, apapun dengan alasan tersebut, ada kemungkinan anda akan mewujudkan keinginan anda terhadap orang lain dalam bentuk apa yang dapat anda lakukan. Apapun dengan alasan tersebut, ada kemungkinan anda akan mewujudkan keinginan anda

²⁸ Steven Lukes, *POWER: A RADICAL VIEW, SECOND EDITION* (Inggris: Palgrave macmillan, 2005).

terhadap orang lain dalam bentuk paksaan serta menurut Weber kekuasaan ialah kemampuan untuk mendominasi orang lain.

Dalam politik kekuasaan diperlukan untuk mendukung dan menjamin jalannya sebuah keputusan politik dalam kehidupan masyarakat. Keterkaitan logis antara politik dan kekuasaan menjadikan setiap pembahasan tentang politik, selalu melibatkan kekuasaannya didalamnya. Itulah sebabnya membahas sekularisasi kekuasaan. Sekularisasi politik secara implisit bertujuan untuk mendesakralisasi kekuasaan untuk tidak dilegimitasi sebagai sesuatu yang bersifat sakral atau suci. Kekuasaan sebagai aktivitas politik harus dipahami sebagai kegiatan manusiawi yang diraih, dipertahankan sekaligus direproduksi secara terus menerus.²⁹

Kekuasaan (power) digambarkan dengan berbagai cara kekuasaan diartikan sebagai kemungkinan mempengaruhi tingkah laku orang-orang lain sesuai dengan tujuan-tujuan sang actor. Politik tanpa kegunaan kekuasaan tidak masuk akal, yaitu selama manusia menganut pendirian politik yang berbeda-beda, apabila hendak diwujudkan dan dilaksanakan suatu kebijakan pemerintah, maka usaha mempengaruhi tingkah laku orang lain dengan pertimbangan yang baik. Kekuasaan senantiasa ada didalam setiap masyarakat baik masih bersahaja maupun yang sudah besar dan rumit susunannya. Akan tetapi selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat.³⁰

²⁹ 1972- Listiyono Santoso, Abdul Qadir Shaleh, and Alwan Ariyanto, 'Teologi Politik Gus Dur', Listiyono Santoso.

³⁰ Soerjono Soekanto, 'Sosiologi Soerjono Soekanto', *Raja Grafindo Persada*, 1986.

Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun. Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan agency, bahwa hal itu untuk kemampuan seseorang melakukan perubahan/perbedaan di dunia. Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebahagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang.

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik adalah yang bisa masuk dalam pengertian individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat individual adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Secara kelembagaan di sini kekuatan-kekuatan politik bisa berupa lembaga atau organisasi-organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik.

Kekuatan politik dimanapun di atas dunia selalu mencerminkan masalah-masalah mendalam kesejarahan dan struktural di mana kekuatan-kekuatan politik itu tumbuh, berkembang dan melakukan peranan. Menurut Hannah Arendt Kekuatan (strength) merupakan sifat atau karakter yang dimiliki setiap individu. Pada hakikatnya kekuatan berdiri sendiri, namun keberadaan kekuatan dapat dilihat dari relasi antara individu terkait dengan orang lain. Karena itu, kekuatan dapat dipengaruhi. Individu yang sangat kuat pun dapat terpengaruh.

Pengaruh yang masuk terkadang tampak seperti ingin memperkuat individu yang bersangkutan, namun sesungguhnya memiliki potensi melakukan pengrusakan terhadap kekuatan.³¹

Kekuasaan ada di semua bidang kehidupan dan mencakup kemampuan untuk memerintah (kemampuan untuk mendudukan subjek) dan kemampuan untuk membuat keputusan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tindakan pihak lain. Konsep kekuasaan dan ototitas selalu terjalin dalam hubungan antara orang dan kelompok sosial.

Max Weber mengatakan, kekuasaan (power) adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bukan mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat. Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber kekuasaan. Birokrasi juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, disamping kemampuan khusus dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum yang tertentu. Jadi kekuasaan terdapat dimana-mana, dalam hubungan sosial maupun didalam organisasi-organisasi sosial.³²

³¹ Rieke Diah Pitaloka, 'Kekerasan Negara Menular Ke Masyarakat', *Yogyakarta : Galang Press, 2004*, p. 210.

³² Arifuddin Siraj, 'Implikasi Kekuasaan Terhadap Konstitusi Dan Pilkada Di Era Otonomi Daerah', *Al-Ulum: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar*, 18.1 (2018), 19–40.

Mengenai kekuasaan dalam pemerintahan desa, Max Weber membagi kekuasaan menjadi tiga macam. Pertama, kekuasaan tradisional, yaitu kekuasaan yang berasal dari tradisi masyarakat berupa kerajaan, dimana kedudukan dan hak pemimpin juga ditentukan oleh adat. Jenis ini dilembagakan dan dirancang untuk memberikan manfaat masa damai bagi penduduk. Kedua, kekuatan karismatik. Tipe yang legitimasinya didasarkan pada pengakuan kualitas khusus dan kesetiaan kepada individu tertentu dan komunitas yang telah dibentuknya, seseorang memiliki tipe ini karena karisma kepribadiannya. Kekuatan tersebut hilang atau melemah ketika orang tersebut melakukan kesalahan fatal. Lebih jauh lagi, itu juga bisa hilang ketika pendapat atau pemahaman orang berubah. Ketiga, kekuasaan rasional hukum, dimana kekuasaan didasarkan pada sistem pemerintahan. Bahwa semua aturan tertulis dengan jelas dan diatur secara ketat, dan bahwa batas kekuasaan pejabat atau penguasa ditentukan oleh aturan main. Ketaatan dan kesetiaan diarahkan bukan kepada seorang pemimpin melainkan kepada suatu lembaga impersonal. Dalam masyarakat demokratis, kewenangan berbentuk sistem birokrasi dan bersifat terbatas dalam waktu (periode). Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang berkuasa sambil menjaga kepentingan publik dalam otoritas yang sah tersebut.

Ketiga tipe kekuasaan tersebut menurut Weber salah satunya terdapat di setiap masyarakat. Pemerintahan Desa dalam konteks ini memiliki kekuasaan paling dekat pada poin ketiga yaitu tipe rasional legal, tetapi dalam aplikasinya mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep ideal Weber.

2.2.5 Teori Local Strongmen

Kajian atau pemahaman mengenai eksistensi orang kuat merupakan konsekuensi langsung dari kajian tentang elit penguasa. Terutama tentang elit yang tidak memerintah langsung atau berkuasa di dalam struktur organisasi formal. Menurut Putnam, orang kuat adalah mereka yang tidak berada di posisi puncak sebuah struktur organisasi namun memiliki pengaruh dan kekuasaan penuh untuk menentukan atau memutuskan ketentuan yang berlaku dalam sebuah organisasi. Karena pengaruh kekuasaan serta reputasi yang dimiliki olehnya, orang kuat dapat memerintah dan mengarahkan elit yang berkuasa dalam hal ini adalah elit formal agar mengikuti semua hal yang sesuai dengan keputusan dan ketentuan orang kuat tersebut.

Dalam analisis Analisis Joel S. Migdal, berdasarkan pada kondisi dan realitas politik seperti munculnya kelompok-kelompok atau institusi informal di luar Negara yang mengurangi efektivitas dan kapabilitas Negara, di beberapa Negara dunia ketiga menunjukkan bahwa, kelemahan-kelemahan Negara dunia ketiga telah melahirkan orang-orang kuat di tingkat lokal. Joel S. Migdal menyebut orang kuat lokal dengan sebutan local strongman. Orang kuat lokal secara konsep jelasnya di definisikan sebagai kekuatan informal baik yang berupa tuan tanah, tengkulak, pengusaha, kepala suku, panglima perang, bos petani kaya, pemimpin golongan dan lain sebagainya, yang berusaha

memonopoli kontrol atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu lewat kerjasama jejaring yang mereka bangun.³³

Local strongman merupakan konsekuensi langsung dari posisi Negara yang melemah, yaitu ketika fungsi kontrol dan mengatur sebuah Negara semakin lemah (weak state). Pada saat yang bersamaan, masyarakat dengan segala social capacity yang dimiliki semakin kuat. Mereka berhasil keluar dari dominasi sebuah Negara, artinya masyarakat disini menjadi relatif lebih otonom di hadapan Negara.

Otonomi yang dimiliki masyarakat diatur dan dikordinasi oleh para pemimpin lokal yang ada. Pemimpin lokal inilah yang pada akhirnya menjadi kekuatan penentu. Para pemimpin lokal ini pula yang menjadi local strongman.³⁴ Lebih lanjut, Migdal menjelaskan bahwa kunci kesuksesan local strongman bukan terletak pada kekuasaan formal atau resmi yang diciptakan. Namun pada pengaruh yang dimiliki.

Meskipun eksistensi local strongman lebih banyak ditentukan oleh tingkat besarnya pengaruh yang dimiliki, namun eksistensi mereka juga sangat ditentukan oleh dukungan struktur Negara. Migdal menyebutnya sebagai triangle of accommodation. Dominasi local strongman akan kurang maksimal ketika Negara tidak memberikan dukungan penuh pada mereka. Oleh karena itu,

³³ Melvin Perjuangan Hutabarat, 'Fenomena "Orang Kuat Lokal" Di Indonesia Era Desentralisasi Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifri Nurdin Di Jambi' (Universitas Indonesia, 2012) hlm .17.

³⁴ Joel S. Migdal., "State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another" (Cambridge) hlm. 59.

eksistensi mereka juga sangat tergantung atas kelihaiannya local strongman ini untuk mendapatkan dukungan Negara. Kolaborasi local strongman dan Negara ini yang mendasari kuatnya pengaruh local strongman dalam masyarakat lokal. Untuk kepentingan Negara, Negara rela memberikan fasilitas sekaligus mengontrol para local strongman.³⁵

Dalam tulisan Migdal, strongman yang berkembang di lokal dapat digambarkan sebagai jaringan sosial yang menyebar di daerah otonom, dimana kontrol masyarakat secara efektif telah terpecah. Kedua, local strongman menjalankan kontrol sosialnya dengan menjalankan berbagai strategi untuk ‘bertahan hidup’ dalam lingkaran politik di masyarakat. Demikian dapat dikatakan bahwa argument Migdal lebih cenderung menempatkan ‘personalism’ dan ‘clientelism’ dalam hubungan patronase politik.

Jadi secara ringkas, keberhasilan local strongman atau orang kuat lokal dalam mencapai distribusi dan pengakuan kontrol sosial mereka di masyarakat menurut Migdal, didasari atas tiga faktor utama. Pertama, karena sifat masyarakat yang berbentuk jejaring, dimana klientilisme tumbuh subur dan berkembang. Sehingga kontrol sosial terfragmentasi pada kekuatan-kekuatan yang ada, karena tidak mampu dimonopoli oleh Negara. Kedua, karena proses akulturasi mitos “strategi bertahan hidup” yang ada dalam diri orang kuat lokal di masyarakat, dan sudah menjadi simbol tersendiri di antara mereka. Di mana orang kuat menjadi satu-satunya tumpuan hidup masyarakat. Dan ketiga,

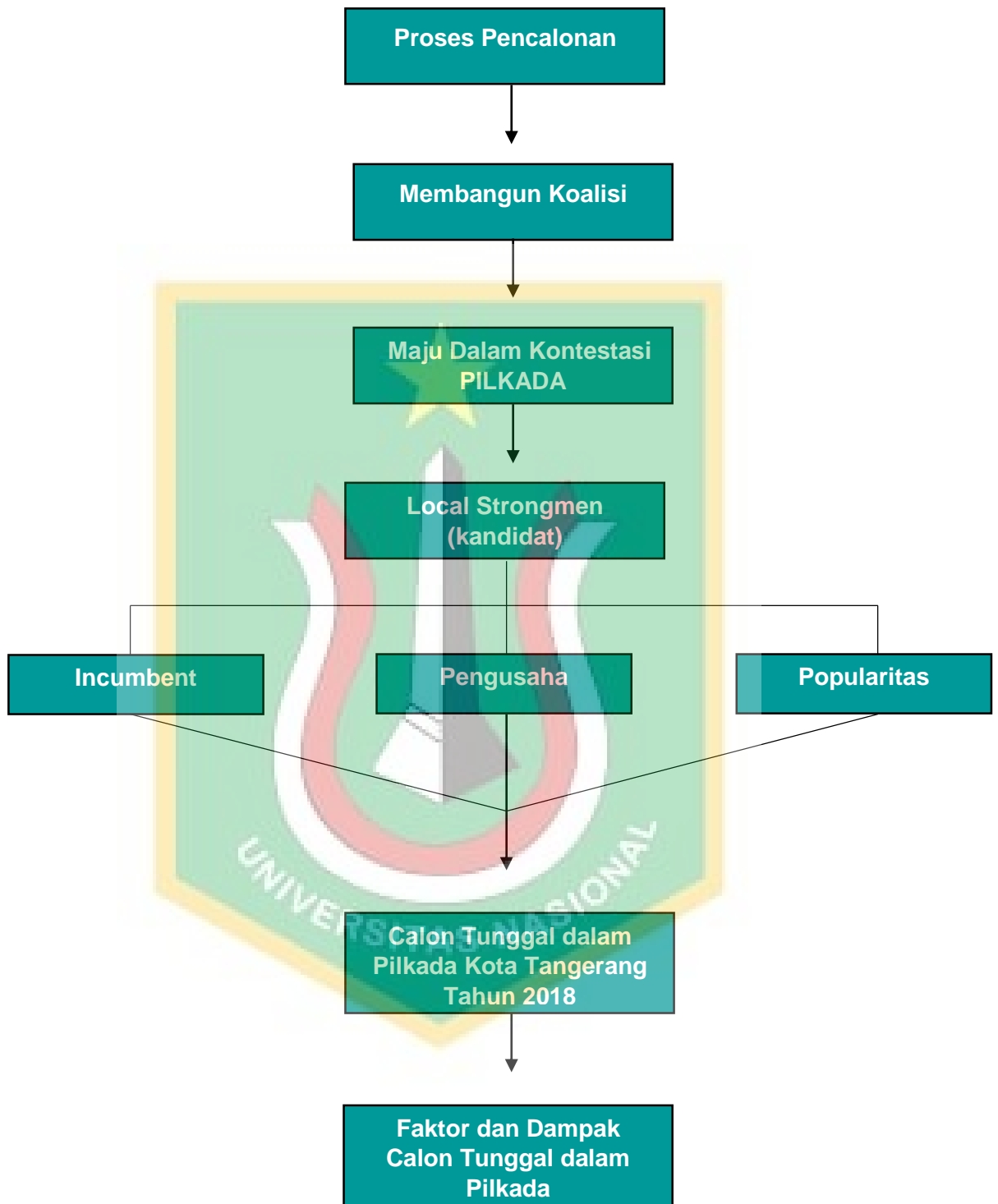
³⁵ Ibid., 256-257.

kemampuan orang kuat lokal mengintervensi, menembus dan menangkap lembaga-lembaga Negara sehingga menjadikan Negara menjadi lemah, yakni melalui semacam gangguan lewat berbagai tindakan koersif yang ditujukan pada birokrat-birokrat pemerintah.³⁶



³⁶ Ibid., 286.

2.3 Kerangka Pemikiran



*Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran
(Sumber: Diolah Oleh Penulis)*

Keterangan :

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa penulis mengambil judul ini dilatar belakangi dengan terlaksananya Pilkada serentak gelombang ketiga tahun 2018 di indonesia khususnya di Kota Tangerang. Dalam penyelenggaraan pilkada kali ini dilaksanakan dengan fenomena calon tunggal yang melawan kotak/kolom kosong. Pasangan calon tunggal yang maju dalam kontestasi Pilkada ini adalah seorang petahana yang latar belakang finansial dan modal sosialnya sangat berpengaruh terhadap masyarakat di wilayah setempat, kemudian dalam prosesnya calon tunggal ini melakukan rangkaian kegiatan untuk mempersiapkan dirinya dalam pemilihan, termasuk membangun koalisi yang dimana pasangan ini diusung dengan kedua belas partai. sehingga keputusan akhirnya pilkada ini dilaksanakan dengan hanya calon tunggal melawa kotak kosong.

Dengan hal ini penulis beranggapan bahwa pembahasan ini perlu menggunakan teori kekuasaan dan teori lokal strongmen serta fungsi partai politik dalam pilkada, sehingga dapat dirumuskan satu permasalahan adakah eksistensi munculnya dampak yang bertolak belakang dengan demokrasi dalam proses pilkada tersebut sehingga akhirnya memunculkan calon tunggal dalam pilkada dengan judul “Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2018”.